

Daftar Pustaka

- Adelina, C., & Betriana, M. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 804–811.
- Ayuningtyas, R., Nuha, G. A., & Zulkarnaeni, A. S. (2025). Determinants of Regional Financial Independence: A Study of Local Taxes, Balancing Funds and Capital Expenditure in East Java (2020-2023). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 18(1), 66. <https://doi.org/10.35448/jrat.v18i1.31712>
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah. (2025). *33 Pemda Serahkan LKPD Tahun 2024 Unaudited kepada BPK Jateng*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOSMy/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-menurut-jenis-pendapatan.html>
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(5).
- Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S., & Rantung, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 123–129. <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8339>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (X)*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Karouw, T. L., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 77–88.
- Kii, H. E., Harmono, & Sumtaky, M. (2022). The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, and other Legitimate Regional Revenues on Regional Independence Through Direct Expenditure (Empire Study: District/City Governments in East Nusa Tenggara Province). *European Journal of Business and Management Research*, 7(6), 204–213. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.6.1719>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14–31. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Terbaru)*. ANDI.

- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110–118.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). *Pengaruh Belanja Modal , Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020*. 1(1), 64–78.
- Novianti, R., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya The Effect of Local Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence in The Government of Tasikmalaya City. *Idonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 196–206.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Kemandirian Fiskal Jawa Tengah Dinilai Baik*. <https://jatengprov.go.id/publik/kemandirian-fiskal-jawa-tengah-dinilai-baik/>
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa*. 1–15.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831–6842.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Shalshyabilla, B., Azzakhusna, F., Anan, E., & Lanaula, R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Ebbank*, 13(2), 19–26.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1266>
- UU. No 23 Tahun 2014. (2014). UU. No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- UU. No 28 Tahun 2009. (2009). *Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- UU No 32 Tahun 2004, 2004. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.